

Analisis Permasalahan Dalam Pendirian Gereja HKBP Laut Dendang

Pocut Puan Geubrina, Ester Sinurat, Errason Pandiangan, Galatia Valentin Hutagalung,
Rohani, Elsa Kardiana

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 15, 2025

Revised April 24, 2025

Accepted April 30, 2025

Available online May 03, 2025

Keywords:

Pendirian Gereja, HKBP Laut Dendang

Keywords:

Establishment of the Church, HKBP Laut Dendang



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Rumah ibadah adalah komponen yang sangat penting dalam suatu agama. Tidak ada yang dapat disebut sebagai suatu agama tanpa adanya sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Agama Kristen menamakan rumah ibadah mereka sebagai 'Gereja', yang artinya rumah bertempat untuk bertemu antara Allah dan umat-Nya. Fungsi dari gereja ini adalah untuk menggambarkan keimanannya dengan melakukan penyanyian lagu-lagu kerohanian dengan tujuan memuja atau memuji Tuhan-Nya. Teknik analisis data menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk melakukan penelitian kualitatif. Subjek yang diteliti dalam pendekatan studi kasus ini. Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai usaha dalam

menciptakan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat bermukim yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, untuk terus berupaya menciptakan kerukunan dan saling pengertian, agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendidikan multikultural, dialog antar agama, dan penegakan hukum yang adil merupakan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

ABSTRACT

A place of worship is a very important component in a religion. Nothing can be called a religion without a clear worship system and a permanent place of worship. Christianity calls their place of worship a 'Church', which means a house where God and His people meet. The function of this church is to describe their faith by singing spiritual songs with the aim of worshiping or praising their God. The data analysis technique uses qualitative research as the data analysis method. This study uses a case study methodology to conduct qualitative research. The subjects studied in this case study approach. In fostering harmony between religious communities, there must be a gap between one and another. Regarding various social problems that contain the potential for conflict in the local community and can disrupt and harm various efforts to create harmony between religious communities, for example, residential areas that function as houses of worship are found in most of the districts/cities targeted by this study. Thus, it is important for all parties, including the government, religious figures, and civil society, to continue to strive to create harmony and mutual understanding, so that similar conflicts do not recur in the future. Multicultural education, interfaith dialogue, and fair law enforcement are some of the important steps that can be taken to build an inclusive and harmonious society.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk, terlihat dari beragamnya perbedaan seperti bahasa, etnis, suku bangsa, dan keyakinan agama. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan bagi Indonesia. Namun, selain itu, kemajemukan juga memiliki potensi kerawanan yang dapat memicu persaingan antar kelompok yang berbeda dan menyebabkan perpecahan.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam ditandai oleh semangat persaudaraan yang erat, saling dukung, gotong royong, dan toleransi. Semangat ini telah mewarnai sejarah bangsa sejak sebelum kemerdekaan, terlihat dalam perjuangan bersama melawan penjajah. Tidak hanya dalam perjuangan kemerdekaan, nilai-nilai toleransi dan gotong royong juga tercermin dalam praktik ibadah yang menghormati satu sama lain dan berbagi tempat, serta mengalami pengaruh budaya lokal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak nilai-nilai penting yang mulai terlupakan, seperti keselarasan dan harmoni antar umat beragama (Suryawati & Syaputri, 2022).

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu persoalan yang sering mengganggu hubungan harmonis antar umat beragama adalah masalah terkait dengan pendirian rumah ibadah. Masalah ini muncul karena ada perbedaan tipis antara hak untuk beribadah dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Beberapa kelompok penganut agama mungkin memandang bahwa hak untuk mendirikan rumah ibadah sama dengan hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat. Padahal, urusan pendirian rumah ibadah sebenarnya merupakan ranah sosial yang bersifat kolektif. Pendirian rumah ibadah di lokasi atau lingkungan yang kurang tepat bisa mengakibatkan ketidaknyamanan atau gangguan dari pihak lain. Ketidaknyamanan yang berlarut-larut dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan.

Rumah ibadah adalah komponen yang sangat penting dalam suatu agama. Tidak ada yang dapat disebut sebagai suatu agama tanpa adanya sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Agama Kristen menamakan rumah ibadah mereka sebagai 'Gereja', yang artinya rumah bertempat untuk bertemu antara Allah dan umat-Nya. Fungsi dari gereja ini adalah untuk menggambarkan keimanannya dengan melakukan penyanyian lagu-lagu kerohanian dengan tujuan memuja atau memuji Tuhan-Nya.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan beberapa masalah mengenai pembangunan rumah ibadah yang telah diteliti oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada hasil dari kelanjutan masalah mengenai pendirian atau perbaikan rumah ibadah umat kristiani di Gereja HKBP Lau Dendang di Desa Lau Dendang

KAJIAN TEORI

Pengertian Gereja

Kata "gereja" atau "jemaat" dalam bahasa Portugis "igreja" dan dalam bahasa Yunani adalah "ekklesia", dari kata Kaleo, artinya "aku memanggil atau memerintahkan". Jika diartikan secara umum eklesia adalah perkumpulan orang-orang. Dari ketiga pengertian tentang gereja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah perkumpulan orang percaya yang dipanggil ke luar dari dunia, dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan Allah baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Selain itu dalam bahasa Yunani ada satu kata lain yang berarti "gereja" yaitu kuriakon yang artinya 'rumah Tuhan'. Gereja merupakan sebuah institusi kompleks yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius. Kajian teori dari berbagai disiplin ilmu dapat membantu kita memahami berbagai aspek gereja, seperti strukturnya, fungsinya, dan perannya dalam masyarakat Gereja, sebagai institusi sosial dan keagamaan, rentan terhadap kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik.

Kajian teori konflik sosial dapat membantu kita memahami akar kesalahpahaman tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Gereja dalam artian gedung adalah gereja yang dibangun secara khusus untuk tempat ibadah orang Kristen, dengan bangunan dan fungsi yang telah disesuaikan untuk menunjang ibadahnya. Sosiologi melihat gereja sebagai sebuah organisasi sosial dengan struktur dan hierarki yang kompleks. Gereja memiliki berbagai peran dalam masyarakat, seperti: Memberikan pelayanan keagamaan: Gereja menyediakan ruang bagi individu untuk beribadah, mempelajari ajaran agama, dan membangun komunitas.

Konflik antar Gereja

Menurut Sigmund Freud, konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih, mengandung agresifitas dan kemudian diekspresikan. Selanjutnya, Schermerhorn berpendapat hadirnya konflik ketika terjadi ketidaksepakatan dalam situasi sosial. Randal Collins menyebutkan konflik sebagai proses sentral dalam kehidupan masyarakat. Dalam konflik, individu dan atau masyarakat dapat menjadi dewasa dalam menyikapi perbedaan, dimana perbedaan adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap manusia. Secara teoritis yang menjadi akar terjadi konflik di tengah masyarakat dan bangsa adalah disebabkan oleh tiga hal yang mendasar, yaitu Security, Identity, dan Resources. Rasa aman, identitas, dan sumber penghasilan. Hal ini kalau tidak terpenuhi atau terancam sangat berpotensi menciptakan konflik sosial yang berakibat sangat fatal. Konflik tersebut dapat terjadi dalam berbagai skalanya, antara lain; konflik berskala massal, konflik non-massal, dan ketegangan antarumat beragama, seperti kasus ketegangan dalam pendirian rumah ibadah yang terjadi di Desa Laut Dendang. Teori konflik yang ditawarkan Louis Kriesberg, seorang Guru besar Resolusi Konflik di Universitas Syracuse, Amerika Serikat. Kriesberg menganggap bahwa konflik pada dasarnya merupakan sesuatu yang natural, niscaya ada dalam kehidupan manusia dengan dua kemungkinan, yakni berakhir secara destruktif atau konstruktif. Setidaknya terdapat tiga mekanisme yang ditawarkan Kriesberg dalam penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif. Pertama, mekanisme internal, yakni berbagai mekanisme dan strategi untuk mencegah hadirnya konflik yang terjadi secara internal dengan mengembangkan sikap-sikap toleransi dan menekankan kebebasan beragama. Mekanisme yang kedua, mekanisme antar-komunitas-agama menuntut semua agama berperan dalam membangun persepsi tentang perdamaian dan menyelesaikan konflik secara

nirkekerasan melalui aktifitas sosial yang melibatkan semua umat beragama. Mekanisme ketiga, mekanisme sistemik, bina damai akan terwujud apabila setiap pemerintah memperlakukan semua agama secara adil.

Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif Kriesberg tersebut guna menganalisis lebih dalam mengenai peluang dan kendala dalam tahapan penyelesaian konflik gereja HKBP Laut Dendang untuk membangun perdamaian yang abadi. Mengenai penyelesaian konflik gereja HKBP berakhir secara damai dan konstruktif. Menurut perkembangannya, gereja tersebut hingga sampai kini aman dan damai.

Teori Konflik

- a. Teori Konflik Sosial: Teori ini menjelaskan bahwa konflik sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan identitas di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus pendirian Gereja HKBP Laut Dendang, konflik dapat terjadi antara umat Kristen yang ingin mendirikan gereja dan komunitas Muslim yang merasa terancam oleh keberadaan gereja tersebut. Menurut Coser (1956), konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memperjelas batasan-batasan sosial dan memfasilitasi perubahan sosial. Dalam konteks ini, analisis konflik dapat membantu memahami dinamika yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
- b. Teori Interaksi Simbolik: Teori ini berfokus pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan membangun makna melalui simbol-simbol sosial. Dalam konteks pendirian gereja, simbol-simbol religius dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan gereja. Penelitian oleh Blumer (1969) menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mempengaruhi cara orang memahami dan merespons situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana simbol-simbol yang terkait dengan agama dan budaya lokal dapat mempengaruhi proses pendirian gereja dan penerimaan masyarakat.
- c. Teori Toleransi Antaragama: Teori ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antaragama dalam masyarakat yang plural. Menurut Ammerman (2007), toleransi antaragama dapat dibangun melalui dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik masing-masing agama. Dalam konteks Gereja HKBP Laut Dendang, pendekatan ini dapat membantu meredakan ketegangan yang ada dan menciptakan ruang bagi kerjasama antarumat beragama. Pendidikan dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan toleransi dan mengurangi konflik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di ambil di geraja HKBP Laut Dendang yang berlokasi di kec. Percut seituan, Kab. Deli Serdang sumatera utara. Pilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, atau sengaja, berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai judul atau penelitian.

Populasi Dan Sampel

Dalam proses penentuan hasil dari suatu populasi penelitian, penelitian yang berjumlah 25 orang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan representatif dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih oleh peneliti adalah mereka yang dianggap paling memahami dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi langsung, melakukan wawancara, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait permasalahan pemahaman terhadap gereja HKBP Laut Dendang di desa laut dendang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk melakukan penelitian kualitatif. Subjek yang diteliti dalam pendekatan studi kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam Pendirian Gereja HKBP Laut Dendang

Dalam 2 dekade terakhir, tak bisa dinaifkan bahwa rumah ibadah merupakan isu sensitif yang kerap kali menjadi faktor pemicu terjadinya ketegangan dan bahkan konflik antar kelompok penganut agama di Indonesia. Salah satunya dengan masyarakat di Desa Laut Dendang. Pemicu konflik ini karena adanya keberatan atau protes masyarakat atas pendirian rumah ibadah. Konflik perselisihan antara umat Muslim dan Kristen tentang renovasi perluasan areal rumah ibadah umat Kristiani, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik X Medan Aceh-Ressort Tegal Rejo Huria Laut Dendang, di dusun III

Desa Laut Dendang. Pada sejarahnya keberadaan gereja HKBP di Desa Laut Dendang tidak mendapatkan pertentangan dikalangan masyarakat meskipun berada di tengah mayoritas penganut agama Islam yang kurang lebih 90 %.

Namun pada tahun 2000, perkembangan jumlah jemaah mengakibatkan kapasitas gereja tidak layak lagi dipergunakan sebagai tempat beribadah. Sehingga pengurus gereja berencana untuk merenovasi gereja. 13 Januari 2003, pengurus gereja menerima tembusan surat yang mengatas namakan masyarakat Dusun III Kenari desa Laut Dendang berisi pernyataan keberatan atas pembangunan gereja HKBP Laut Dendang. Januari 2003, Bupati Deli Serdang mengundang pengurus gereja dan warga masyarakat Dusun III Kenari untuk melaksanakan pertemuan di kantor Camat Percut Sei Tuan, dipimpin langsung oleh pihak pemerintah kabupaten dan menyimpulkan bahwa pemerintah tidak ada alasan melarang berdirinya gereja HKBP Laut Dendang dengan pertimbangan bahwa gereja telah berdiri sebelum adanya surat edaran Gubernur Sumatera Utara maupun peraturan lainnya dan gereja itu sudah berdiri lebih 14 tahun.

Namun demikian, sampai saat ini pengurus gereja HKBP Laut Dendang belum pernah menerima surat resmi yang merupakan tindak lanjut pertemuan tersebut di atas. 9 September 2007, untuk menindaklanjuti rencana renovasi dilaksanakan acara pesta, turut diundang warga masyarakat dusun III Kenari dan sekitarnya serta undangan panitia yang hadir diperkirakan 100 orang. Pelaksanaan pesta berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Namun 10 September 2007, pengurus gereja menerima tembusan surat dari yang mengatasnamakan masyarakat Dusun III Kenari desa Laut Dendang yang menyatakan keberatan atas pembangunan/ pendirian gereja HKBP Laut Dendang. 26 November 2007, panitia pelaksana renovasi bangunan gereja memulai penggalian pondasi dan merakit besi tiang cor. Pada tanggal 28 November 2007 kepala desa mengundang pengurus gereja dan warga masyarakat Dusun III Kenari untuk melaksanakan pertemuan dan membahas tentang tuntutan keberatan atas berdirinya bangunan gereja HKBP Laut Dendang, dari hasil kesepakatan kedua belah pihak antara lain agar renovasi bentuk gereja bangunan gereja ditunda sementara, dan masyarakat tidak merasa keberatan atas berdirinya gereja HKBP Laut Dendang apabila persyaratan Perizinan pendirian gereja telah dapat dipenuhi. Pada tanggal 13 desember 2007 pimpinan gereja HKBP Laut Dendang menyatakan demi terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif, maka renovasi bentuk bangunan gereja dihentikan juga memperhatikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum terbit.

Semenjak renovasi bangunan gereja resmi diberhentikan oleh pemerintah sebelum IMB terbit, maka pada tahun 2008 sampai tahun 2011 pihak gereja terus berupaya mengurus IMB, namun syarat-syarat yang dipenuhi menurut SKB 2 Menteri sulit untuk didapatkan dari masyarakat lokasi gereja. Sehingga pada Mei 2011 pihak gereja mencoba kembali membangun tanpa IMB dengan pemikiran bahwa gereja HKBP Laut Dendang sudah berdiri sebelum SKB 2 Menteri itu terbit dan pemikiran kedua bahwa gereja tersebut adalah untuk direnovasi bukan membangun baru. Namun usaha itu juga gagal dengan datangnya LSM tertentu yang sangat keras menentang pembangunan gereja tersebut, sehingga pembangunan pun diberhentikan.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik antar umat beragama di Laut Dendang antara lain:

1. Adanya perbedaan ideologi

Perbedaan ideologi merupakan faktor yang dominan dari berbagai faktor yang ada, kajian ideologi ini selalu difokuskan pada konflik antar agama yang sering dipicu oleh muatan dogmatis atau misi agama dengan tidak menafikan faktor-faktor lainnya. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi agama yang mereka anut adalah yang lebih benar. Sebaliknya paham ideologi agama orang lain dianggap salah dan tidak benar, hal ini mengakibatkan lahirnya sentimen keagamaan yang muncul dari masyarakat sekitar mengenai nyanyian rohani yang dilakukan pemuda Kristen disaat azan maghrib dikumandangkan. Hal ini yang menjadi pokok permasalahan antara umat Islam dengan Kristen. Toleransi antar umat beragama yang selama ini dibangun menjadi lebur akibat ketidak pengertian pemuda Kristen dalam memaknai pentingnya toleransi dan menyesuaikan diri dalam lingkungan komunitas yang mayoritas muslim. Hal ini tentu mengundang emosi masyarakat sehingga dapat meleburkan kerukunan antar umat beragama di Laut Dendang.

2. Pendirian rumah ibadah

Kehadiran sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadah dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan agama semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama. Masalahnya akan menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan

Mendagri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

Desa Laut Dendang, Desa yang terletak di Jalan Tegal Sari Dusun IX Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan adalah Desa yang masyarakatnya menganut agama Islam sebanyak 80% dan Kristen sebanyak 20%. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Desa Laut Dendang Tersebut. Masyarakat Desa Laut Dendang sebagian setuju dalam pendirian rumah ibadah sangat signifikan, karena berkaitan dengan hubungan kerukunan umat beragama. Masyarakat Desa Laut Dendang yang tidak setuju atas pendirian rumah ibadah dapat menimbulkan konflik karena tidak memperoleh dukungan masyarakat setempat yang secara mayoritas berbeda agama dengan pemilik dan pengguna rumah ibadah.

3. Truth claim (klaim merasa diri dan agama paling benar)

Dalam konteks hidup bertetangga dan bermasyarakat banyak sekali pihak yang merasa keyakinannya lebih benar daripada keyakinan orang lain. Dan ketika keyakinannya diragukan oleh pemeluk agama lain ia merasa sakit hati sehingga menimbulkan konflik. Permasalahan utama dalam pendirian Gereja HKBP Laut Dendang meliputi penolakan dari masyarakat mayoritas. Permasalahan ini menunjukkan betapa sensitif dan kompleksnya isu pendirian rumah ibadah di wilayah dengan komposisi agama yang tidak seimbang, serta perlunya pendekatan dialogis dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

4. Sikap Eksklusif yang menjadi sorotan pemicu terjadinya konflik.

Sikap eksklusif ini menjadi hambatan terwujudnya kerukunan dan menjadi pemicu terjadinya konflik. Dalam tataran internal, masih kerap ditemukan tokoh agama yang justru mengajarkan fanatisme dan ekstrimisme yang keliru kepada warganya. Sehingga tidak menutup kemungkinan warganya menjadi eksklusif terhadap agama lain. Ironisnya tokoh agama ini ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain tokoh agama tersebut seakan-akan sebagai pioner pelaksanaan dialog demi kerukunan.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai usaha dalam menciptakan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat bermukim yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan kehadiran rumah ibadah yang dipandang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai masih harus memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, intelektual, masyarakat, maupun peran institusi yang mengatasnamakan agama.

Upaya atau solusi yang telah dilakukan terhadap eksistensi Gereja HKBP Lau Dendang di Desa Lau Dendang

Dinamika konflik yang terjadi di Gereja HKBP Laut Dendang merupakan cerminan kompleksitas tantangan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Protes yang dilancarkan oleh masyarakat setempat mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses pendirian gereja yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa konflik seringkali berakar dari kesenjangan komunikasi dan kurangnya pemahaman antara berbagai kelompok agama. Menurut pendapat kelompok kami, penyelesaian konflik terkait pendirian Gereja HKBP Laut Dendang harus dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan prinsip saling menghormati dan pengakuan atas keberagaman agama sebagai bagian dari kekayaan sosial masyarakat. Kami berkeyakinan bahwa setiap kelompok agama memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan memiliki tempat ibadah yang memadai. Oleh karena itu, penolakan terhadap pendirian atau renovasi rumah ibadah tidak seharusnya dilandasi oleh kepentingan mayoritas semata, melainkan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama. Dengan adanya penghormatan yang tulus dari seluruh lapisan masyarakat, potensi terjadinya konflik dapat diminimalisasi secara signifikan.

Lebih jauh, kelompok kami menilai pentingnya peran pemerintah sebagai penengah yang netral dan bertanggung jawab dalam menegakkan regulasi serta memastikan semua proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah harus mampu bertindak tegas dan adil dalam mengeluarkan perizinan, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau diistimewakan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengurus gereja dan masyarakat sekitar. Ketidaktepatan dalam proses perizinan selama ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan, sehingga penyelesaian harus berorientasi pada penegakan aturan yang transparan dan tidak

diskriminatif. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai penjaga ketertiban sekaligus pelindung hak beragama seluruh warga negara tanpa kecuali.

Kelompok kami juga berpendapat bahwa pengurus gereja dan komunitas Kristen di Laut Dendang perlu menunjukkan sikap yang sensitif terhadap kondisi lingkungan sosial tempat mereka berada. Hal ini mencakup pengertian terhadap kebiasaan serta norma mayoritas masyarakat sekitar dan bagaimana cara beradaptasi tanpa menghilangkan identitas agama mereka. Sikap saling menghargai dan menyesuaikan diri dapat memperkuat keberlangsungan kerukunan serta mengurangi ketegangan yang ada. Demikian pula, pihak mayoritas yang beragama Islam hendaknya mampu menempatkan sikap toleransi sebagai prinsip utama dalam berinteraksi, sehingga tidak menimbulkan kesan penolakan sepihak yang dapat memicu konflik.

Secara keseluruhan, kelompok kami meyakini bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di Laut Dendang tidak cukup hanya dengan menyelesaikan aspek teknis perizinan, tetapi harus didukung dengan perubahan sikap dan budaya yang lebih terbuka dan inklusif. Keadilan dalam perlindungan hak beragama, peran aktif pemerintah dalam penegakan hukum, serta upaya pendidikan toleransi merupakan pilar utama yang harus dijalankan bersama. Dengan begitu, harmonisasi antarumat beragama bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Laut Dendang. Komitmen semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati menjadi kunci agar konflik yang pernah terjadi tidak berulang kembali di masa mendatang dan kehidupan sosial dapat berjalan dengan harmonis.

Hasil riset lapangan yang dilakukan oleh tim kami menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh keberadaan fisik gereja semata, tetapi juga oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendirian gereja. Masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam dialog yang konstruktif, sehingga memunculkan persepsi bahwa gereja tidak menghormati keberadaan dan keyakinan mereka sebagai bagian dari komunitas. Selain itu, kelompok kami menekankan bahwa upaya jangka panjang yang esensial dalam menghadapi konflik keagamaan adalah melalui pendidikan dan pembinaan sikap toleransi sejak dini. Pendidikan tentang keberagaman dan pentingnya saling menghormati harus diperkuat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penanaman nilai-nilai ini dapat mengurangi sikap eksklusif dan prasangka negatif yang selama ini menjadi penyebab utama perpecahan antarumat beragama. Kegiatan yang mengedepankan kebersamaan antara pemuda dari berbagai latar belakang agama juga sangat diperlukan. Melalui interaksi yang positif dan kegiatan bersama, rasa kekeluargaan dan persaudaraan akan tumbuh, sehingga konflik dapat diredam sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.

Sebagai respons terhadap konflik yang berkepanjangan, pengurus gereja mengambil langkah strategis dengan merelokasi gereja ke lokasi baru yang diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan. Di lokasi yang baru ini, gereja juga telah memperoleh izin mendirikan bangunan, dan sejauh ini belum mengalami gangguan yang signifikan dari masyarakat sekitar. Namun, perlu disadari bahwa relokasi ini bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan semua masalah. Ketidakpuasan masyarakat masih membayangi, dan perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pengurus gereja mencakup peningkatan intensitas komunikasi dengan masyarakat setempat. Meskipun dialog formal belum dapat diwujudkan, pengurus gereja berupaya untuk lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan tujuan gereja. Langkah ini diharapkan dapat membangun jembatan kepercayaan antara jemaat gereja dan masyarakat sekitar, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling menghormati.

Analisis permasalahan dalam pendirian Gereja HKBP Laut Dendang memberikan pelajaran berharga bahwa konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik seperti keberadaan bangunan gereja, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan dan nilai antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Meskipun gereja telah berupaya untuk beradaptasi dan mencari solusi melalui relokasi, tantangan tetap ada dalam menjaga hubungan yang harmonis antara jemaat dan masyarakat sekitar. Upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik, saling menghormati antar kelompok agama, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik ini dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan toleran di masa depan.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, untuk terus berupaya menciptakan kerukunan dan saling pengertian, agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendidikan multikultural, dialog antar agama, dan penegakan hukum yang adil merupakan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Semoga analisis yang lebih mendalam dan diperluas ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Gereja HKBP Laut Dendang, serta memberikan inspirasi bagi upaya-upaya membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai usaha dalam menciptakan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat bermukim yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, untuk terus berupaya menciptakan kerukunan dan saling pengertian, agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendidikan multikultural, dialog antar agama, dan penegakan hukum yang adil merupakan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

SARAN

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang gereja HKBP Laut Dendang adalah:

1. Komunikasi: Komunikasi yang baik antara pihak-pihak terlibat dalam konflik adalah faktor yang penting. Setiap pihak harus diperhatikan dan diterima sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan.
2. Mediasi: Mediasi yang profesional dan terstruktur dapat membantu mengurangi konflik. Mediator yang neutral dan berpengalaman dapat membantu mencari solusi yang diinginkan oleh semua pihak.
3. Pengenalan: Pengenalan yang baik antara pihak-pihak terlibat dapat membantu mengurangi konflik. Mereka harus memahami perspektif dan kebutuhan yang berbeda.

REFERENSI

- Damanik, J. (2015). Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 123-135.
- Effendy, O. U. (2010). *Komunikasi dan Agama: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, S. (2016). *Konflik dan Resolusi dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, A. (2018). Toleransi Antaragama di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(1), 45-60.
- Nasution, H. (2019). *Dinamika Sosial dalam Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Gereja dan Masjid di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja". *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Sunarno, A., Ikbal, A., & Indrawati, L. (2023). Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 93-100.
- Arifinsyah, A., & Fitriani, F. (2019). Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang). *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).